



TANAH DAN PERMASALAHANNYA DI PAPUA

Izak Resubun

Abstract: Abundant natural richness and relatively small number of population of Papua make Papua a promising land of fortune for many outsiders to come to make a better life. The presence of the migrants, on one hand, means extra burden to the land that has to feed more people than ever before. The migrants, on the other hand, help to contribute in increasing efforts in exploitations of Papua's natural resources for the welfare of the people. The exploitations now cause problems to the land and the living environment. Firstly, land-clearing activities occurred because of careless way of the forest management. Second, destruction of the living environments happened as a result of the tailing from the mining operations. These problems are caused by two differing viewpoints concerning nature and its resources. Having emotional, socio-cultural and religious connections to the land the native Papuans cultivate it in sensible manner. However, for those living in an urban culture, or even those in metropolitan, land is a source of living and must be exploited to its maximum capacity for the sake of the well-being of the society.

Interesting to notice, in terms of land usage, a number of Papuans are turning to adopt the urban viewpoint that considers land as a commodity. For them land is not meant to be protected and preserved, but to be traded in. Even worse, in desperate need of money, there are cases where individuals forcefully claim a big sum of money over the sold piece of land

79

Keywords: *land • natural resources • environment • indigenous people • Papua*

Di mana-mana tanah menjadi masalah, bila terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan ketersediaan tanah 'kosong' atau tidak dipakai. Konsep tanah kosong mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan budaya yang dihidupi





seseorang. Bagi kelompok masyarakat yang satu, tanah yang tidak diolah berarti tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pelbagai maksud, padahal bagi yang lain tanah memang sengaja tidak digunakan karena alasan-alasan kultural tertentu, mis.: alasan sosio-religius. Saya menggumuli permasalahan tersebut dalam tulisan ini, namun sebelumnya saya ingin menyajikan dua pengalaman berikut.

Pertama, pada bulan Oktober 1997 saya berada di desa paling selatan dari pulau Kimaam, tepatnya desa Kladar. Dari informasi saya tahu bahwa pada masa lalu penduduk desa itu lebih banyak jumlahnya daripada masa sekarang (1997). Lebih lanjut disebutkan bahwa sebagian penduduk bermigrasi ke beberapa lokasi lain, mis.: desa Batu Merah dan desa Kumbis (dua desa yang berada di selat Mariana). Sayang, orang-orang setempat tidak menyebutkan alasan kepindahan tersebut, namun kemudian saya mengetahui bahwa alasan sosio-politis menyebabkan mereka bercerai-berai dari desa asalnya. Kenyataan itu telah menimbulkan pertanyaan dalam hati saya, namun yang lebih mengejutkan lagi adalah pengalaman orang-orang tersebut di pemukiman barunya. Perasaan mereka saya ringkaskan sebagai berikut: lahan kebun di sini tidak luas dan tidak subur, dan terutama kami tidak merasa tenang, aman dan tenteram di sini karena tanah ini milik Orang Marind. Pernyataan ini tentu mengejutkan, karena Orang-orang Kimaam secara sosio-kultural disebut *Marind bob* (Marind rawa). Jadi mereka juga Orang Marind, namun perasaan tidak aman dan tenteram di pemukiman baru melahirkan pertanyaan dalam hati para pemerhati masalah-masalah sosial di tanah Papua.

Kedua, tanah dan pemukiman selalu menjadi masalah serius dan abadi bagi kaum urban yang mengadu nasibnya di kota-kota. Untuk penduduk kota Jayapura dan sekitarnya, pengalaman palang memalang mis.: rumah, kantor atau fasilitas umum seperti jalan raya telah menjadi amat lazim dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah pembayaran ganti rugi yang diminta, palang akan disingkirkan dan hidup serta aktivitas berlangsung seperti biasa sampai ada tuntutan baru kemudian hari. Kenyataan ini menimbulkan beberapa pertanyaan berikut: “Bagaimana pandangan Orang Papua tentang tanah? Apa dan bagaimana hubungan antara Orang-orang Papua dengan tanah?” Apa saja permasalahan menyangkut tanah di Papua pada masa kini? Apa motif di belakang pemanfaatan tanah yang demikian baik oleh kaum pendatang maupun oleh orang-orang pribumi? Mengapa tanah yang sudah dibayar masih dituntut ganti rugi lagi? Apakah tidak ada manipulasi dalam kleim



terhadap tanah dari generasi yang berbeda?” Demikian beberapa pertanyaan yang diajukan dan saya berusaha menjawab sebagian pertanyaan itu melalui tulisan ini.

Saya membagikan tulisan ini dalam bagian-bagian berikut: Pendahuluan, Pandangan Orang-orang Papua tentang Tanah, Masalah-masalah Tanah di Papua pada Masa Kini, Tanah dan Kebutuhan Manusia, Penutup.

Pandangan Orang-orang Papua tentang Tanah

Dalam bagian ini saya coba menguraikan pandangan Orang-orang Papua tentang tanah, walaupun saya harus mengakui bahwa tidak mudah melakukannya karena antara lain amat bervariasi kelompok suku yang mendiami tanah Papua yang demikian luas. Uraian ini akan meliputi: Tanah sebagai Kebun, Tanah sebagai Tempat Suci atau Keramat, Tanah adalah Ibuku, Diriku, Identitasku.

Tanah sebagai Kebun

Tak dapat disangkal bahwa Papua merupakan sebuah pulau yang amat kaya dengan hasil alam, baik di hutan, di dalam tanah maupun di laut. Bila orang ingin makan sagu, ia akan pergi ke dusun dan menebang, menokok serta memprosesnya dan sesudah beberapa jam ia akan memperoleh tepung sagu. Demikian juga halnya dengan ikan atau daging, ia akan pergi memancing atau menjaring dan biasanya hasil tangkapan lumayan banyak, atau pergi berburu babi hutan atau binatang buruan lainnya. Kebutuhan sayur-mayur diambil dari pucuk-pucuk muda tumbuhan tertentu. Pola hidup demikian dikenal dengan nama pola hidup peramu (Boelaars, 1986). Maksudnya, orang-orang peramu mempertahankan dan melangsungkan hidupnya dengan langsung memetik dari alam seperti juga dilakukan oleh Orang-Orang Aborigines di Australia (Elkins, 1986: 31). Sikap hidup demikian amat ramah lingkungan, karena sumber daya alam tak pernah dikeruk habis-habisan, sehingga mereka dengan mudah sekali dapat menggunakan sebidang tanah untuk waktu yang lama.¹ Yang sering tidak diketahui dan dilupakan

¹ Dalam kaitan dengan pandangan manusia tentang tanah, R. W. Walker membedakan antara budaya metropolitan dan budaya asli atau lokal. Bagi yang pertama, tanah dipandang sebagai sumber kehidupan semata, sehingga demi kepentingan ekonomis segalanya dapat dikorbankan dengan



adalah kenyataan bahwa masyarakat lokal mempunyai pengetahuan yang amat seksama tentang lingkungan sekitarnya, mis.: buah-buahan dan daun-daunan tertentu boleh dimakan, air dari tali tertentu boleh diminum, juga batas antar dusun-dusun diketahui dengan pasti. K. Maddock (1986: 28) juga mencatat bahwa seorang kapten Inggris terheran-heran ketika melihat seorang perempuan Aborigines menggali umbi-umbian dari dalam tanah sebagai bahan makanan.

Tanah dan hutan menjadi kebun bagi Orang-orang Papua tidak dapat tidak berkaitan erat dengan penguasaan teknologi mereka yang terbatas. Dalam suatu dunia di mana hasil kebun atau buruan tidak dapat disimpan lama, maka tidak ada salahnya dibagikan dengan sesama, karena mereka juga akan melakukan hal yang sama bila mereka mendapatkan rejeki di kemudian hari. Gaya hidup ini masih dipraktekkan oleh masyarakat pedalaman, yang menggunakan hasil produksinya sampai habis, lalu mencari lagi karena lingkungan sekitar masih memungkinkan. Hidup anggota masyarakat lokal di kota sudah mengalami perubahan baik dalam hal produksi maupun konsumsi serta perencanaan hidup ke depan.² Uang yang diperoleh tidak dihabiskan untuk membeli keperluan hidup, melainkan selalu dijaga agar ada modal untuk kegiatan jual-beli pada hari-hari esoknya karena kebun mereka adalah pekerjaan atau profesi yang mereka tekuni.

Dengan mengatakan bahwa tanah merupakan kebun bagi Orang-orang Papua, maka tersirat suatu masalah pelik di belakangnya, yaitu hak kepemilikan tanah. Pada beberapa suku hak atas tanah diwariskan kepada anak-anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan yang belum berkeluarga dapat mengambil hasil dari dusun orangtuanya, tetapi anak-

akibat bahwa tanah akan dikeruk habis-habisan. Yang kedua melihat tanah sebagai ibu yang menghidupi segala makhluk hidup, termasuk manusia, sehingga tanah tidak akan digunakan secara berlebihan melainkan dijaga dan dilestarikan (1989: 152).

² Dalam penelitian mahasiswa STFT Fajar Timur pada bulan Mei 2006 terhadap ibu-ibu Papua yang terlibat dalam kegiatan jual-beli di pasar Youtefa, ternyata mereka sudah mengalami perubahan besar dalam teknik dagang. Mereka bukan lagi menjual hasil kebunnya, tetapi membelinya dari orang lain lalu menjual kembali. Di samping itu mereka juga sudah terbiasa mengatur keuangan sehingga selalu ada modal untuk membeli jualan pada hari-hari berikutnya.

anak perempuan yang telah menikah mengambil hasil hutan dari dusun suaminya (Tenjap, 1974: 16). Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa warisan tanah dan dusun dapat diperoleh dari ibu³, sehingga sulit sekali menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum di tanah Papua. Seseorang dapat mewarisi tanah atas pelbagai cara, a.l.: karena kelahiran dan keanggotaan dari klen, suku tertentu, pengetahuan (sejarah) akan tanah tersebut. Untuk memperoleh pengetahuan itu, amatlah mendesak bagi seseorang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan religius, mis.: ritus inisiasi, karena di dalamnya ceritera-ceritera tua dan mite-mite serta simbol-simbol diberikan.⁴ Hal yang sama juga dilakukan oleh Orang-orang Aborigines di Australia (Maddock, *op. cit.*: 31). Berkaitan dengan kepemilikan tanah ini sedang terjadi pergeseran di Papua, khususnya di distrik Assue, Kabupaten Mappi (Papua Selatan), karena para perempuan dilarang mengambil hasil hutan dari dusun orangtuanya oleh saudara-saudara laki-laki mereka, padahal sebelum gaharu dikenal tidaklah demikian. Mungkin ada baiknya dicatat bahwa dalam kelompok-kelompok tertentu seseorang kehilangan haknya atas tanah, bila ia tidak terus-menerus memperhatikannya; seperti yang terjadi di kalangan Orang Yah'ray (Boelaars, 1981: 23).

Telah saya kedepankan bahwa tanah menjadi kebun bagi Orang-orang Papua. Pernyataan tersebut harus dikoreksi, karena gaya hidup peramu hanya dilakukan oleh sebagian suku Papua, sedangkan yang lain-lainnya mempratekkan pertanian yang agak rumit, mis.: suku Dani di lembah Balim, suku Mee di Paniai dan suku Kimaam di pulau Kimaam. Yang terakhir menciptakan tanah kering untuk keperluan pemukiman dan untuk pertanian. Usaha tersebut memakan banyak waktu, tenaga dan biaya, karena struktur pulau tersebut yang tinggi pada bagian pinggirnya sedangkan rendah pada bagian tengahnya.⁵ Hasilnya sungguh luarbiasa,

³ Hasil interview dengan para perempuan di desa Assaren, salah satu desa dari distrik Etsi, Kabupaten Mappi, pada bulan Maret 2005.

⁴ Dalam ritus inisiasi *Kamil Nenga* di kalangan suku Ngalum dari Pegunungan Bintang, selain mendapat banyak pengetahuan dari tutornya seorang inisiandus dilumuri tanah merah sebagai simbol kepemilikan atas tanah yang diwariskan Sang *Atangkei* kepada setiap manusia (Dolfinus Kasipmabin, 2005: 39).

⁵ L. M. Sarpent (1965) melukiskan kehebatan Orang-orang Kimaam dalam membangun pulau-pulau buatan untuk dihuni dan dijadikan lahan pertanian. Pulau-pulau diciptakan dengan menumpukkan lumpur dan

bukan hanya cukup untuk kebutuhan setiap hari tetapi juga digunakan dalam festival *ndambu* yang tersohor itu, karena berat petatas *ndambu* bisa mencapai 40-60 kg. Kondisi pulau Kimaam yang demikian mengakibatkan penduduknya mempunyai suatu keterikatan khusus dengan tanah. Karena itu tidak mengherankan bahwa ada keluhan atau kekecewaan yang diungkapkan oleh mereka yang pindah ke pemukiman baru seperti saya kemukakan pada pendahuluan di atas.

Konsekuensi dari pandangan dan sikap hidup demikian amat menguntungkan konservasi terhadap tanah dan lingkungan hidup pada umumnya, sehingga hasil hutan atau pun kebun tidak diambil habis, agar mereka selalu masih dapat kembali ke sana. Sikap hidup ini juga mengakibatkan tanah tidak digarap secara intensif, sehingga menimbulkan kesan bahwa orangnya malas atau tidak tahu memanfaatkan tanah secara efisien, padahal orang lain lupa bahwa orang-orang ini mengambil hasil kebun ataupun hutan hanya sejauh dibutuhkan dan sisanya ditinggalkan demi hari esok atau kelangsungan spesies yang bersangkutan. Sikap hidup ini amat ramah lingkungan dan memungkinkan suatu kehidupan bersama yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada sikap *homo economicus* yang hanya mengobyekkan alam sekitarnya.

Tanah sebagai Tempat Suci atau Keramat

Tempat suci atau tempat pemali bukanlah suatu fenomena aneh di tanah Papua. Di mana-mana kita dapat menemukan tempat pemali, karena setiap suku, marga bahkan mungkin setiap *patrilineage*⁶ mempunyai tempat demikian. Namanya berbeda-beda antara suku yang satu dengan yang lain, mis.: Orang Muyu menyebutnya *ketpon* (Schoorl, (1957) 1993: 19). Tidak setiap orang mempunyai akses ke tempat-tempat itu, bahkan anggota suku atau marga yang sama sekalipun. Anggota masyarakat

tumbuhan rawa berlapis-lapis sampai akhirnya menjadi lebih tinggi dari permukaan air. Di daerah selatan Kimaam saya alami bahwa bedeng pertanian hampir 2 meter tingginya. Mereka masih mempunyai persediaan umbi-umbian di kebun, kendati tahun 1997 dikenal dengan musim panas yang panjang.

⁶ Yang dimaksudkan dengan *patrilineage* adalah penelusuran garis keturunan melalui pihak laki-laki dan anggota-anggota kelompok turunan ini masih mengenal leluhur pria bersama yang menurunkan kelompok tersebut.

dilarang mengambil bahan bangunan, makanan dan berburu di tempat demikian, walaupun biasanya hasil hutan dan binatang buruan banyak terdapat di sana. Situasi serupa juga ditemukan di kalangan Orang-orang Aborigines yang melindungi tempat demikian dengan pelbagai larangan (Maddock, *op. cit.*: 33).

Pada akhir Maret 2005 saya bertanya tentang tempat keramat kepada penduduk asli di daerah Assue (distrik Etsi). Ada yang menjawab dan yang lain tidak menjawabnya, bahkan ada yang balik bertanya: “Mengapa saya menanyakan hal itu?” Saya memperoleh jawaban a.l.: orang-orang tertentu saja boleh masuk ke tempat pemali, a.l.: pemilik, tua-tua adat dan orang yang tahu bagaimana caranya masuk ke tempat-tempat demikian. Alasan yang mendorong mereka memasuki tempat-tempat pemali adalah meminta bantuan leluhur atau melakukan kegiatan ritual tertentu.

Ada suatu pertanyaan yang mengusik hati saya: “Mengapa ada orang-orang yang tidak mau menjawab pertanyaan saya?” Pasti ada alasan serius di belakang keengganan mereka dan saya berpikir, walaupun belum begitu pasti, bahwa latarbelakang religiuslah yang menyebabkannya. Saya coba menjelaskannya sebagai berikut. J. Pouwer pernah menulis tentang orang-orang Mimika bahwa roh pribadi (*ipn*) dari seseorang berasal dari *mbii* (roh dari roh-roh) dan *mbii* muncul dari dunia bawah tanah dan ketika ia melewati perempuan-perempuan yang lagi tidur, roh setiap anak memilih ibunya sendiri dan masuk ke dalam rahim ibunya. Orang Mimika membedakan antara aspek spiritual dan fisik dari kehamilan. Dalam pemikirannya, mereka mendahulukan yang pertama daripada yang terakhir (1955: 58). Hal ini tidak berarti hubungan badaniah suami-isteri tidak diakui, karena lahirnya seorang anak merupakan hasil kerjasama antara roh anak dan suami-istseri. Mungkin lebih penting lagi bahwa *mbii* diyakini hidup di dunia ini, di suatu tempat khusus. Eksistensi roh di tempat tertentu tersebut menyebabkan orang-orang setempat mentabukan, mensakralkan dan menguduskannya. Informasi yang sama saya peroleh dari seorang kolega yang lama berkecimpung dalam pelayanan di antara Orang-orang Asmat.⁷ Mungkin

⁷ Sebagai ilustrasi, di antara Orang-orang Aborigines rite kelahiran dimulai sejak seorang perempuan merasakan kehamilan, yang disebabkan oleh roh pahlawan mitologis. Roh itu adalah roh klen yang hidup di tanaman atau pada binatang atau pun wilayah tertentu. Foetus dijiwai oleh roh klen, karena itu ada hubungan khusus di antara anak itu dengan makhluk totemistisnya



apa yang saya bahas di sini ada hubungannya dengan *Dema*,⁸ yang luas dikenal dalam literatur Melanesia, yang muncul pada saat tertentu di dunia untuk melaksanakan tugasnya dan kemudian menghilang setelah menyelesaikan tugasnya. Biasanya tempat keluar dan masuknya *Dema* atau pun tempat tinggalnya menjadi tempat sakral atau suci (van Baal 1966: 123) dan merupakan tempat pemali bagi orang-orang setempat, sehingga tidak setiap anggota komunitas lokal mendapat akses ke wilayah itu, apalagi bagi orang-orang asing (Schoorl, 1993: 106).

Yang menarik adalah lokasi tempat keramat masyarakat setempat biasanya disembunyikan bagi orang-orang luar. Tidak ada satu keseragaman ciri atau sifat dari lokasi-lokasi demikian, ada kalanya hulu-hulu sungai, sering kali rawa-rawa tertentu, atau pun hutan atau gunung tertentu. Satu hal yang tak dapat disangkal adalah tempat seperti itu tampaknya lebih menyejukkan, lebih memancarkan aroma kehidupan daripada tempat-tempat yang lain, mis.: terlihat dari banyaknya pohon-pohon kayu, juga tumbuh-tumbuhan dan binatang yang ada di situ. Kenyataan ini mungkin diakibatkan oleh larangan bagi manusia untuk tidak memasuki tempat keramat atau pun larangan untuk tidak mengambil hasil hutan atau berburu di sana, sehingga tanaman dan binatang tidak diusik oleh manusia⁹ dan bertumbuh dan berkembang biak dengan leluasa. Melihat kenyataan ini, ternyata tempat keramat mempunyai fungsi lain yang tidak kalah penting bagi kehidupan manusia,

(Elkin, 1986: 232). Bila anak lahir diadakan rite kelahiran, karena anak itu merupakan pembiakan dari baik klen maupun makhluk ilahi (Maddock 1986: 21).

⁸ *Dema* adalah pencipta alam semesta dan manusia beserta tradisinya bagi masyarakat Melanesia, yang setelah menciptakan segalanya tidak lagi berintervensi dalam kehidupan setiap hari, namun kadang-kadang muncul dalam wujud manusia atau hewan atau pun tumbuh-tumbuhan. Van Baal berpendapat bahwa konsep *dema* tidak mendapat arti yang sama pada setiap kelompok suku. *Dema* sering diartikan sebagai makhluk mitis atau pun makhluk totem (1966: 178-180).

⁹ Pada tahun 2004 saya mengadakan penelitian di pulau Aduar, Kabupaten pulau-pulau Aru. Ketika saya hendak memotong rotan yang menghalangi jalan, saya dicegah oleh seorang anak kampung, katanya: "Di sini hanya tuan tanah yang boleh memotong rotan, sedangkan pemali (tabu) bagi orang-orang lain." Karena itu tidaklah mengherankan bahwa masih terdapat banyak tanman rotan di pulau kecil tersebut.



yakni: sebagai tempat perlindungan bagi hewan dan tanaman. Maksudnya, tanaman dan hewan yang ada di daerah itu tidak diganggu atau diambil sembarangan, sehingga dapat berkembang biak dengan baik. Orang-orang tahu bahwa tanaman dan hewan ada di situ dalam jumlah besar, namun mereka terikat kewajiban untuk tidak boleh mengusik ketenangan dan ketenteraman lokasi itu, sehingga amanlah wilayah tersebut dengan segala isinya. Karena itu saya melihat bahwa tempat-tempat keramat dapat menjamin konservasi lingkungan hidup agar manusia berlaku ramah terhadap alam sekitarnya seperti yang dicanangkan dunia internasional dan pemerintah.

Tanah sebagai Ibu

Tanah dipandang sebagai ibu atau mama yang mengandung, melahirkan, memelihara, mendidik dan membesarkan manusia sampai sekarang ini. Pandangan demikian ditemukan dalam beberapa suku Papua, mis.: Mee, Ngalum, Amugme. Pada suku yang terakhir ini, tanah sesungguhnya rahim yang membentuk dan melahirkan manusia, sehingga bila manusia merusakkan alam maka ia menghancurkan dirinya sendiri. Mama Orang Amugme terbentang dari utara ke selatan. Di sebelah utara terdapat puncak-puncak gunung yang tinggi dan serentak menjadi tempat suci di mana tersimpan ajaran mama dan tempat tinggal arwah nenek moyang, sedangkan kaki-kaki mama terletak di bagian selatan, yang mengalirkan air yang memberikan kehidupan pada dunia sekitarnya. Bagian-bagian tubuh lainnya menjadi tempat tinggal bagi manusia Amugme. Tanah tersebut indah dan subur serta menjadi lahan kebun bagi mereka. Dalam alam seperti itu Orang-orang Amugme merasakan ketenangan dan kedamaian, di luar itu mereka tidak akan merasa tenteram dan aman. Mereka tidak pernah merasa terpisah dari alam sekitarnya, merupakan bagian dari alam sekitarnya, bahkan alam adalah aku seperti ditegaskan oleh seorang tokoh masyarakat Amugme (Bria, 2004: 3).

Pandangan seperti ini mengandaikan suatu affinitas antara manusia dengan tanah atau alam sekitarnya. Karena itu tidak mengherankan bahwa orang-orangnya mempunyai hubungan emosional yang mendalam dan solidaritas yang tinggi dengan tanah (Stockton, 1986:8). Dengan kata-kata Walker, orang-orang dari budaya asli atau lokal mempunyai pandangan, sikap dan aksi yang berbeda terhadap alam sekitarnya daripada orang-orang yang berbudaya metropolitan, karena



tanah, ibu manusia, memberikan segalanya bagi manusia, mulai sejak dari kelahiran sampai dengan kematian, ketika manusia menyatu kembali dengan tanah.¹⁰ Kesadaran bahwa tanah memiliki makna yang mendalam bagi mereka bukan hanya diungkapkan dalam kata-kata tetapi juga dinyatakan dalam tindakan-tindakan simbolis dalam ritus-ritusnya, mis.: ritus pembukaan kebun baru bagi Orang-orang Ngalum diawali dengan tindakan makan segumpal tanah oleh setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut (Bria, *op. cit.*: 9). Tindakan ini menandakan bahwa tanah memberikan kesuburan dan kehidupan bagi manusia, sehingga manusia harus menyatu dengan tanah sebelum mengolahnya demi kebutuhan hidupnya. Manusia yang menyadari dan meyakini tanah dan alam raya atas cara ini akan memperlakukannya dengan amat teliti, agar ia tidak menghancurkan atau merusakkannya secara tidak perlu.

Di atas telah saya bahas kepemilikan tanah di antara Orang-orang Papua, mis.: pada Orang-orang Etsi (suku Awyu), yang memberikan kemungkinan kepada para saudari untuk mengambil hasil hutan dari dusun orangtuanya pada masa dulu sebelum gaharu dikenal di daerah itu pada sekitar tahun 1995. Bria mencatat bahwa lokasi mendirikan rumah dari seorang anak perempuan yang telah menikah adalah milik ibunya, karena itu ia mendapat kedudukan yang kuat di antara anggota masyarakatnya, bahkan ia dapat mewarisi tanah garapan dari orangtuanya (*ibid.*: 9-10). Dengan demikian ia memperoleh posisi yang lebih kuat terhadap suami dan keluarganya, karena ia memiliki akses ke sumber hidup yang utama, yaitu tanah, dan ia dapat juga mewariskan tanah itu kepada anak-anak perempuannya, sehingga ia tak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak mertuanya.

¹⁰ Rite kematian Aborigines mengenal pelbagai upacara pelepasan, penguburan dan perpisahan. Bila seseorang meninggal, maka jenazahnya akan dikuburkan untuk sementara waktu. Pada umumnya penguburan sementara ini berlangsung beberapa tahun, tergantung dari kesanggupan anggota keluarga yang masih hidup mengumpulkan harta untuk penguburan final. Jika semuanya telah siap, maka tulang belulang akan digali kembali dan dibersihkan lalu dicat dengan tanah liat yang berwarna-warni dan akhirnya ditanam kembali, agar bersatu dengan totemnya (Borsboom, 1994: 258). Sepengetahuan saya, sebelum pemerintah dan misi katolik masuk di pulau Kimaam, masyarakat setempat mempraktekkan upacara penguburan dan peringatan arwah yang amat mirip dengan yang dilakukan oleh Orang-orang Aborigines.



Tanah adalah Diriku, Identitasku¹¹

Di atas telah saya uraikan bahwa Orang-orang Papua mempunyai suatu ikatan afektif dengan tanah, dan kenyataan ini sering dipertegas oleh identifikasi diri seseorang dengan tanah tersebut. Ada baiknya dikedepankan bahwa terdapat dua teori tentang identitas seseorang. Yang pertama adalah teori Mendel yang memberi tekanan pada unsur genetis-biologis, sedangkan yang kedua teori Lamarck yang melihat relasi sosial sebagai elemen utama dan desisif dalam menetapkan identitas seseorang (Linnekin dan Poyer, 1990: 7-8). Orang Papua dan Oceania lainnya menghidupi teori kedua, sehingga orang-orang yang hidup bersama seseorang serta lingkungan alam sekitar menjadi unsur desisif bagi identitas seseorang yang oleh Lieber, (1990: 72) disebut *consocial and shared biography*. Dalam pemahaman ini, terdapat suatu relasi erat antara individu, sesama, leluhur dan tanah. Yang paling penting dalam menentukan identitas seseorang bukanlah aspek genetis-biologis, tetapi lingkungan sosial dan lingkungan tempat tinggal (Watson, 1990: 26). Kenyataan ini mungkin bisa menerangkan sikap amikal dan generositas yang tinggi pada Orang-orang Papua dalam menerima tamu-tamu.¹²

Tanah sebagai identitas pribadi seseorang bukanlah hal yang luarbiasa dalam pengalaman hidup harian kita. Setelah memperkenalkan diri kepada orang lain, lawan bicara kita akan mengajukan pertanyaan: “Dari mana anda berasal?” Kita menyebutkan tempat asal kita dan dengan demikian kita menyatakan identitas kita. Dalam situasi biasa mungkin perkenalan kita sudah memadai dan pembicaraan akan berlangsung di antara dua kenalan. Tanah sebagai identitas pribadi merunut pada suatu kenyataan lain yang lebih mendalam, yaitu otonomi pribadi. Saya coba menjelaskannya lebih lanjut demikian. Masyarakat Melanesia dan Papua merupakan kelompok-kelompok kecil yang

¹¹ Tanah hanyalah satu dari sekian banyak kategori yang digunakan untuk mendefinisikan identitas seseorang di Papua dan Melanesia (bdk. Resubun, 2004: 69-86).

¹² Saya maksudkan bahwa Orang-orang Papua menerima tamu-tamunya dengan ramah tamah dan amat bersahabat. Mereka berjabat tangan dan tidak jarang saling merangkul serta mencium satu sama lain pada saat bertemu satu sama lain. Mereka menjamu para tamu sebaik mungkin dengan menyajikan segala yang terbaik yang mereka miliki. Para tamu akan melakukan hal yang sama pada saat mereka mendapat kunjungan.

tersebar di dusun-dusun yang letaknya berjauhan satu sama lain (Borsboom & Ploeg, 1992). Sejak masuknya pemerintah dan agama-agama Kristen mereka dikumpulkan dalam kampung-kampung, agar pendidikan dasar dapat dimulai. Proyek desanisasi pemerintah Republik Indonesia (1970-an), yang sering dengan paksa dilaksanakan, menghasilkan desa-desa seperti sekarang ini, namun kita masih dapat menemukan bekas-bekas pengelompokan asali, karena setiap klen menempati bagian tertentu di desa-desa baru itu. Informasi yang saya peroleh dari beberapa kolega yang telah puluhan tahun bekerja di Papua bahwa pembagian tempat tinggal di desa baru di daerah Muyu, misalnya, selalu dilakukan menurut desa asal setiap klen. Kendati demikian mereka selalu akan kembali mengambil bahan makanan dari dusunnya sendiri, sehingga sering kali dialami bahwa penduduk lokal meninggalkan desa barunya dan pulang ke dusunnya, bila mereka berpendapat bahwa mereka dapat hidup lebih baik di sana. Dengan berdiam di dusun sendiri, setiap orang dan klen mengalami otonomi yang tinggi. Di dusun sendiri mereka menjadi *tuan* atas dirinya dan tanahnya.¹³ Di atas tanahnya sendiri, pengaruh, apalagi intimidasi, dari luar yang tidak berkenan di hati, akan ditolak dengan halus atau bahkan dengan kekerasan. Di dusun sendiri, mereka menjadi bebas dan otonom, karena pada dasarnya masyarakat Papua tidak mengenal organisasi sosial yang lebih besar dari suku, apalagi sistim pemerintahan sentralistik yang represif.

Dapat disimpulkan bahwa pandangan Orang-orang Papua tentang tanah amatlah positif dan patut dipertahankan, jika kita ingin melestarikan tanah, hutan, sungai dan rawa serta laut dengan segala isinya demi kelangsungan hidup kita bersama anak cucu di masa depan. Pandangan yang demikian positif tidak selalu dipraktekkan dalam hidup, terutama dalam kehidupan dunia modern, yang lebih memberikan penekanan pada aspek ekonomi, lebih khusus lagi ekonomi pasar yang menjadikan uang sebagai alat transaksi di antara penjual dan pembeli. Ekonomi pasar merubah banyak hal dalam hidup manusia, termasuk relasi antar manusia dan relasi manusia dengan tanah.

¹³ Pengalaman Orang-orang Kladar (Pulau Kimaam) di desa Kumbis (daratan pulau Papua) memperlihatkan bahwa mereka tidak merasa bahagia hidup di sana, karena tanah tersebut tidak subur dan terutama bukan milik mereka, sehingga mereka tidak merasa aman dan tenteram hidup di sana. Menurut mereka, setiap saat Orang-orang Marind dapat mengusir keluar mereka dari situ.

Masalah-masalah Tanah di Papua Masa Kini

Alam dan isinya dipercayakan kepada manusia untuk diolah demi kehidupan dan kelangsungan hidupnya. Mis.: sebagai lokasi membangun desa dan pemukiman, lokasi berkebun, membangun fasilitas umum seperti jalan raya, gedung kantor dan sekolah, pusat perbelanjaan. Terdapat banyak sekali pemanfaatan lingkungan hidup secara positif, namun ada pula yang menimbulkan masalah baik bagi yang punya hak ulayat dan pihak-pihak lain yang punya keprihatinan terhadap alam maupun bagi pemakai tanah karena ulah yang punya hak ulayat. Yang terakhir saya sajikan di bawah ini dengan bertolak dari pemberitaan *Cenderwasih Pos* (Cepos), harian lokal yang terbit di Jayapura.

Kasus Illegal Logging

Rasanya, kasus semisal banyak terjadi di tanah Papua, di mana perusahaan penebangan kayu beroperasi. Saya mengambil contoh, masalah *illegal logging* yang dilakukan PT. Wapoga. *General manager* dan *camp manager* sebagai tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan izin penggunaan alat-alat berat oleh tujuh Kopermas yang berkerjasama dengan PT. Wapoga. Juga terungkap bahwa PT. Wapoga telah menyetor ke rekening Menteri Kehutanan dana reboisasi sebesar sepuluh (10) milyar rupiah. Jika benar bahwa masing-masing koperasi masyarakat (Kopermas) memiliki areal operasi seluas 1050 hektar (ha), maka hal itu berarti 7350 ha yang digarap. Tidak jelas entahkah 10 M rupiah untuk lahan seluas 7350 ha atau masih terdapat lagi lahan lain yang digarap PT. Wapoga, sehingga sulit untuk menilai apakah jumlah itu memadai atau tidak. Yang pasti, perusahaan memperoleh keuntungan dari usaha tersebut, sehingga berani membayar dana reboisasi sebesar itu dan menanggung segala risiko lainnya.

Yang mengesankan dari *illegal logging* adalah kegiatan itu telah menghancurkan 72 % hutan yang ada di Indonesia, termasuk Papua, dan telah berlangsung puluhan tahun. Kenyataan ini merupakan pembodohan dan pemiskinan masyarakat setempat, walaupun hasil hutannya melimpah mereka tetap saja hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Para cukong kayu yang beroperasi di Indonesia menganggap bahwa di Indonesia tidak ada hukum, kendati ada aturan dan penegak hukumnya, namun semuanya dapat dibeli dengan uang (Cepos, Senin, 19 Juni 2006, hal. 1 & 2), bahkan ada aparat hukum yang

turut melibatkan diri dalam bisnis demikian (bdk. Cepos, Sabtu, 28 Mei 2006, hal. 1 & 4).¹⁴ Hutan bukan hanya penghasil kayu yang dapat dieksploitasi, tetapi juga menjadi habitat bagi flora dan fauna, paru-paru bagi bumi, penahan air dan banjir dan lain-lain yang semuanya amat berguna bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena itu hutan seharusnya bukan ditebangi habis-habisan, melainkan dijaga dan dilestarikan demi generasi sekarang dan yang akan datang.

Kasus Freeport Indonesia Tembagapura

Jika dibandingkan dengan *illegal logging*, maka kasus kedua ini lebih berat dan mendapat perhatian yang luas dari pelbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat kecil, mahasiswa dan kaum intelektual sampai orang pemerintahan pusat dan luar negeri. Puncak dari ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap PT. Freeport diperlihatkan dengan demonstrasi besar-besaran dan pemalangan jalan raya Jayapura-Sentani, tepatnya di depan gedung UNCEN lama di Abepura, yang menelan korban baik harta maupun nyawa.¹⁵ Para pendemo menuntut agar PT. Freeport Indonesia ditutup dengan mengemukakan berbagai alasan seperti pengrusakan lingkungan hidup dengan pembuangan limbah logam yang tak dapat dipertanggungjawabkan, kejahatan perpajakan dan penjarahan kekayaan Papua serta pelanggaran HAM (bdk. Cepos, Senin, 06 Maret 2006, hal. 1 & 2; Cepos, Kamis, 16 Maret 2006, hal. 1 & 2).

¹⁴ Dalam kasus ini yang disidangkan adalah masalah pemalsuan surat-surat oleh seorang pimpinan aparat penegak hukum (Kabupaten), sedangkan kayu-kayu hasil penebangan belum diperkarakan. Penundaan putusan pengadilan negeri dipandang masyarakat setempat sebagai upaya untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa.

¹⁵ Demo pada tanggal 15 Maret 2006, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Abepura berdarah, menyebabkan beberapa anggota masyarakat dan aparat keamanan meninggal dunia, sedangkan para tersangka ada yang ditahan dan yang lainnya terus dikejar oleh aparat keamanan. Kejadian itu akan diikuti dengan pemeriksaan dan pengadilan bagi terdakwa; suatu situasi yang memakan banyak waktu dan tenaga.



Seorang pejabat tinggi legislatif RI berharap bahwa PT. Freeport tidak ditutup, karena akan mengakibatkan kerugian ekonomis yang besar bagi negara (Cepos, Kamis 02 Maret 2006, hal. 1 & 7). Namun justru karena kepentingan ekonomis negara lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat setempat, maka terjadilah banyak pelanggaran HAM di Papua. Rupanya, perlawanan terhadap PT. Freeport telah berlangsung sejak tahun 1970-an dan rasanya tidak pernah akan berakhir selama masyarakat lokal belum mengalami keadilan. Maksudnya, jika kompensasi yang dibayarkan tidak memenuhi harapan dan keinginan pemilik hak ulayat tanah di mana PT. Freeport beroperasi, maka entah mereka sendiri atau orang-orang setempat lain akan mengorganisir unjuk rasa menuntut keadilan dalam pembagian hasil tambang di Tembagapura. Sebenarnya ada pelbagai masalah yang berkaitan dengan PT. Freeport, mis.: masalah pengrusakan lingkungan, pembagian hasil, masalah HAM, atau pun masalah penambang kecil. Permasalahan seharusnya dipilah-pilah dan dicarikan solusi yang terbaik melalui suatu perundingan yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, a.l.: pemilik hak ulayat, PT. Freeport, PEMDA setempat.

Kasus Palang-memalang

Budaya palang-memalang lagi marak di mana-mana di tanah Papua. Beberapa data yang terbaru saya sajikan sebagai berikut. Pada Cepos, Sabtu, 24 April 2005, hal. 5 terdapat berita bahwa kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Dasar (SD) Doyo Baru dihentikan, karena ada ancaman dari Ondoafi setempat. Alasan yang dikemukakan: belum dibayar ganti rugi atas tanah tempat bangunan SD didirikan. Dengan bantuan beberapa pihak, proses belajar-mengajar dapat berjalan kembali.

Cepos, Selasa, 5 Juli 2005 hal. 10 mencatat bahwa Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah dipalang oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Lembaga Kerukunan Pewaris Raising Jefrari. Yang menarik bahwa mereka juga mengirim sepucuk surat kepada kepala BPKP yang berisikan tuntutan pembayaran ganti rugi atas hak ulayat atas tanah yang digunakan. Yang lebih menarik lagi, ada informasi bahwa hal itu sudah sering terjadi pada setiap pergantian kepala BPKP.

Cepos, Jumat, 01 Juli 2005, hal. 13 menyebutkan bahwa sekelompok anggota masyarakat Supiori memalang jalan di kota Biak.



Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan sebagian anggota masyarakat terhadap pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung di Kabupaten Supiori.

Dalam Cepos, Sabtu, 23 Juli 2005 hal. 12, diberitakan bahwa penduduk asli Nimbokrang mempermasalahkan tanah yang diserahkan kepada para transmigran dengan akibat kegiatan pertanian terhenti. Konsekuensinya, ekonomi distrik Nimbokrang pun mengalami penurunan. Daerah ini dikenal sebagai penghasil jeruk manis yang dikonsumsi masyarakat kota Jayapura.

Tempat pembuangan akhir (TPA) Nafri menarik perhatian, karena jalan raya Nafri dipalang seperti dimuat dalam Cepos, Selasa, 07 Juni 2005 hal. 9 & 11. Pemalangan dilakukan sebagai protes terhadap pemerintah kota Jayapura yang tidak menangani sampah sebagaimana mestinya dan menurut dugaan telah menyebabkan penyakit muntah berak (muntaber) yang diderita oleh warga setempat yang telah menelan 2 korban jiwa. Akibatnya truk-truk sampah tidak dapat membuang muatannya dan menunggu hasil negosiasi antara pimpinan dengan warga dalam suatu rapat di rumah ondoafi setempat.

Informasi dari Cepos, Selasa, 17 Januari 2006, hal. 10 menyebutkan bahwa TPA di kampung Nafri kembali dipalang oleh warga setempat karena realisasi tuntutan warga belum dipenuhi, yakni uang yang diminta belum dibayar. Akibatnya truk-truk sampah tidak dapat membuang muatannya dan membawa kembali sampah ke kantor Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) di APO sambil menunggu petunjuk lebih lanjut.

Ruko "Multi" Sentani dipalang, demikian berita Cepos, Kamis, 09 Juni 2006 hal. 12. Ruko itu dipalang, agar pihak-pihak yang bersangkutan datang membahasnya secara kekeluargaan dengan orang-orang yang punya hak ulayat, demikian pemrakarsa aksi tersebut. Aksi pemalangan dilakukan karena tuntutan ganti rugi atas tanah sebesar dua milyar rupiah belum dibayar oleh developer kepada pemilik hak ulayat. Pada halaman yang sama juga diberitakan bahwa pelepasan tanah sudah dilakukan dengan pembayaran sebesar satu milyar rupiah, namun entah kenapa muncul tuntutan baru yang lebih besar lagi.

Tanah dan Kebutuhan Manusia

Tanah dan manusia merupakan dua fenomena yang tak dapat dipisahkan, bahkan manusia tak dapat dipikirkan tanpa tanah, karena manusia adalah makhluk berbadan yang hidup di atas bumi dan bila ia beralih dari dunia ini, maka ia tak lagi disebut manusia. Namun berbeda dengan segala makhluk lain, manusia menduduki tempat sentral dalam alam, sehingga pembangunan dan pemanfaatan alam pun terarah dan berpusat pada manusia, agar manusia itu dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia.¹⁶ Seperti dikedepankan Menteri Negara Lingkungan Hidup pembangunan berkelanjutan pun mengabdikan tujuan yang sama, yakni: manusia dan kebutuhannya (2002: 10). Muncul pertanyaan: “Untuk apa saja manusia menggunakan tanah?” Tentu ada berbagai keperluan, namun saya melihat tiga kebutuhan berikut: Pemenuhan Kebutuhan Harian, Pemenuhan Kebutuhan Pasar Global, Pemenuhan Kebutuhan akan Ruang.

Pemenuhan Kebutuhan Harian

Dengan ekonomi di sini dimaksudkan produksi, distribusi dan konsumsi barang-barang langka.¹⁷ Tanah dan alam sekitar bukan hanya untuk dikagumi atau dijaga dan dipelihara, namun mestinya dimanfaatkan demi manusia. Dalam konteks ini pembahasan tentang cara produksi memainkan peranan penting. Dengan bertolak pada cara produksi, Yan Boelaars (1984) membagikan masyarakat Indonesia dalam empat tipe, yaitu: peramu, petani ladang, petani sawah, pedagang. Mungkin perlu ditambahkan pengusaha, karena Orang-orang Indonesia

¹⁶ Apa yang saya kemukakan di sini amat manusiawi dan demikianlah yang terjadi dalam kehidupan setiap hari. Demi pemenuhan kebutuhannya manusia menggarap alam sekitar. Hal ini amat berseberangan dengan semangat kemiskinan St. Fransiskus dari Asisi yang menghayati suatu persaudaran dengan alam semesta dan yang melihat serta mengalami makhluk-makhluk lain sebagai simbol kehadiran Allah dan yang menghantar dia ke suatu perjumpaan pribadi dengan Allah (Chang, 1989: 86, 114).

¹⁷ Barang langka adalah sesuatu yang amat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, namun jumlahnya terbatas dan dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkannya.

sekarang telah memproduksi sendiri kebutuhannya, bahkan mengekspor beberapa produknya ke luar negeri.

Cara produksi yang paling bersahabat dengan lingkungan adalah peramu. Pembawa budaya ini hanya mengambil apa yang disediakan oleh alam. Tindakannya tidak seberapa besar dampaknya pada alam sekitarnya. Masih ada sekelompok kecil umat manusia yang menghidupi gaya hidup ini, mis.: Orang Penan di Malaysia. Para peladang dengan gaya bertaniya dapat dikategorikan dalam pengelola hutan yang berkelanjutan, karena lahan pertanian diberikan waktu untuk memulihkan dirinya sendiri sebelum digarap lagi.¹⁸ Kesulitan sistim ini terletak pada ketersediaan lahan untuk para petani, sehingga hanya dipraktekkan di tempat-tempat di mana jumlah penduduk tidaklah padat. Para petani sawah mengolah tanahnya secara intensif dengan mengusahakan irigasi ke sawahnya, agar mereka dapat bekerja terus sepanjang tahun. Sering dibarengi juga dengan menanam jenis tanaman yang waktu panennya pendek. Kesuburan tanah dijaga dengan mengadakan rotasi tanaman dan menggunakan pupuk. Model ini sudah kurang ramah lingkungan, apalagi wilayah demikian pada umumnya berpenduduk padat, sehingga mau tak mau lahan pertanian terus diperluas, sampai akhirnya hampir tidak ada lagi hutan.

Orang pesisir dikenal sebagai pedagang yang menjual barang-barang yang diproduksi sendiri atau membelinya dari orang lain untuk kemudian menjualnya kembali. Dalam filsafat mereka, tanah berfungsi untuk melayani kepentingan manusia, sehingga tanah harus dimanfaatkan untuk mendatangkan uang. Sikap dasar mereka terhadap materi dapat disingkat sebagai entahkah sesuatu punya nilai uang atau tidak. Karena itu, bila mereka tidak menemukan yang dapat menghasilkan uang di daerahnya sendiri, maka mereka mencarinya ke mana saja, bahkan rela meninggalkan daerah kelahirannya berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, demi suksesnya pencarian mereka (*ibid.*:

¹⁸ Orang-orang Lauje Gunung, di wilayah Tinombo-Tomini, Sulawesi Tengah, mempraktekkan pertanian ladang, dalam arti sesudah sebidang tanah diolah dan hasilnya tidak memuaskan, maka akan ditinggalkan untuk beberapa tahun agar dapat pulih kembali kesuburannya dan kemudian akan digarap lagi oleh pemiliknya (Ruwiastuti, 2000: 27).

59).¹⁹ Sikap hidup ini tidak ramah lingkungan, karena tanah dilihat sebagai sarana untuk memperoleh kekayaan, karena itu tidak mengherankan bahwa tanah dikeruk habis-habisan. Budaya ini disebut budaya metropol dan orang-orangnya dikenal sebagai orang yang berani mengambil risiko, kreatif, inovatif.

Bila melihat pada distribusi dan konsumsi, maka peramu membagikan semua hasil usahanya dengan teman-temannya, sedangkan para petani membagikan sebagian hasil usahanya dan menjual sisanya. Pedagang menjual hasil produksinya dan membeli dari yang lain apa yang dibutuhkan. Mungkin dapat disimpulkan bahwa peramu dan petani memproduksi untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan pedagang mengusahakan sesuatu dengan orientasi pada pasar. Konsumsi para peramu dan petani biasanya berasal dari produksi sendiri, walaupun tak dapat disangkal bahwa beberapa kebutuhan lain dibeli di pasar dan untuk itu mereka membutuhkan uang tunai. Kaum pedagang hidup dari menjual dan membeli, sehingga uang sebagai alat pembayaran merupakan hal yang lumrah bagi mereka.²⁰ Dengan menyinggung pasar dan uang, maka saya sudah masuk ke bagian berikut, yaitu pembahasan tentang perdagangan global.

¹⁹ Dalam penelitian di distrik Assue, Kabupaten Mappi, pada bulan Maret 2005, saya menemukan bahwa Orang-orang Bugis, Buton, Makassar (BBM) berada di daerah-daerah kantong penghasil kayu gaharu. Mereka telah menetap di sana dan memegang peranan penting dalam perdagangan gaharu di wilayah tersebut. Menurut informasi, mereka baru datang ke sana, setelah pohon gaharu dijumpai di sana pada tahun 1995. Sebelumnya, para pendatang yang ada hanyalah para guru di kampung-kampung dan pegawai-pegawai negeri lainnya di kota Etsi.

²⁰ Dalam penelitian mahasiswa STFT Fajar Timur 2006 (komunikasi pribadi) tentang urbanisasi di kota Jayapura dan sekitarnya ditemukan keluhan dari kaum urban bahwa di kota uang tunai dibutuhkan setiap saat untuk membayar ini dan itu, mis.: membeli makanan, tiket bus. Karena itu kaum urban hampir tidak bisa berbuat sesuatu, bila tidak punya uang. Situasi ini dialami sebagai beban dalam kehidupan di kota, bila dibandingkan dengan kehidupan di desa.

Pemenuhan Kebutuhan Perdagangan Global

Sebenarnya bagian ini termasuk dalam aspek ekonomi, namun saya merasa perlu untuk membahasnya dalam nomor tersendiri, karena topik ini telah menyebabkan degradasi baik alam maupun manusia. Dalam perdagangan global yang sering sulit sekali ditelusuri pusatnya, telah ditentukan kriteria untuk barang-barang yang akan diimport, sehingga negara pengekspor terpaksa menyesuaikan diri dan memenuhinya, agar eksportnya dapat diterima. Jika negara eksportir tidak mematuhi ketentuan importir, maka produknya dinyatakan tidak layak masuk dengan akibatnya membusuk atau dijual dengan harga murah, padahal telah dikeluarkan biaya yang besar untuk menghasilkannya. Saya memberikan tiga contoh di bawah ini.

Yang pertama adalah industri ikan laut. Penangkapan ikan telah dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi dan hasilnya tangkapannya mencukupi kebutuhan hidup harian mereka bahkan masih ada kelebihan untuk dijual. Namun situasi berubah, ketika industri ikan masuk dengan kapal-kapal yang menggunakan pukat harimau, dan menangkap ikan dalam kawasan yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional serta sering kali memasuki wilayah negara-negara lain (Durning, 1995: 223). Perkembangan industri demikian sungguh luar biasa, namun tidak bertahan lama karena hasil tangkapan terus berkurang akibat habitat ikan-ikan dihancurkan oleh pukat-pukat tersebut dan kriteria ekspor yang diterapkan oleh perusahaan menyebabkan banyak tangkapan terpaksa dibuang dan ini malapetaka bagi penduduk setempat. Ada yang menyebutkan bahwa 38% dari tangkapan dimaksudkan untuk ekspor (French, 1995: 432), sisanya dipergunakan sendiri dan atau dibuang karena tidak memenuhi kriteria yang diminta. Selain itu masih ada kesulitan teknis lainnya yang mengakibatkan hasil tangkapan membusuk dan terpaksa dibuang, mis.: terlambatnya pengiriman *cool box*, tiadanya angkutan.²¹ Situasi demikian

²¹ Pada bulan Oktober 1997, saya menyaksikan berton-ton ikan kakap dan sejenisnya yang membusuk di pantai dekat desa Kladar, pulau Kimaam. Masyarakat desa pasti mengalami kerugian yang luar biasa, tetapi tidak melakukan sesuatu sebagai protes terhadap situasi yang mereka hadapi. Kapal-kapal dengan perlengkapan yang sama masih bisa ditemukan di pantai barat pulau-pulau Aru pada musim angin timur dan nantinya akan berpindah lagi ke pantai timur pada musim angin barat.

berlaku hampir di seluruh pesisir pantai di Republik ini, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya kembali.

Yang kedua menyangkut penebangan hutan untuk memperoleh kayu keras dan kayu gelondongan. Di sini pun kualitas, ukuran dan jenis kayu ditentukan oleh importir, sehingga eksportir harus mengikuti apa yang diminta oleh importir. Akibat dari penebangan sungguh luar biasa terhadap masyarakat lokal dan alam sekitarnya, karena flora dan fauna yang ada di situ turut dimusnahkan yang tentunya juga berdampak pada manusianya. Di atas telah saya singgung kasus PT. Wapoga, namun masih terdapat banyak sekali kasus semisal yang terjadi baik di Indonesia, khususnya Papua, maupun di negara-negara lain. Yang menarik dari masalah penebangan kayu adalah orang-orang setempat tidak mengetahui bahwa wilayah hak ulayatnya telah 'dijual' oleh penguasa kepada pihak-pihak tertentu untuk mengolah hasilnya. Akibatnya, sering muncul perlawanan dari orang-orang setempat terhadap pengusaha. Yang lebih aneh lagi mereka dicap oleh pemerintah atau aparat keamanan sebagai subversif atau sekurang-kurangnya tidak mau bekerjasama. Suku Penan di Malaysia juga melakukan hal yang sama terhadap perusahaan kayu yang masuk menebang kayu di wilayah pemukiman mereka (Durning, *op. cit.* : 257). Contoh lain diambil dari desa Sawa Erma, Distrik Asmat (dulu), kini Kabupaten Asmat. Di sini penduduk setempat menebang kayu dari hutannya sendiri dan menjualnya kepada pengusaha. Pada waktu itu dibayar oleh pemegang hak penguasaan hutan (HPH) uang sejumlah Rp 200,- sebagai ganti rugi per meter kubik kayu, sedangkan ongkos penebangan, tarik dan perakitan kayu telah ditetapkan oleh Bupati Merauke (Ruwiastuti, *op. cit.*: 19). Selain perdagangan kayu, hasil hutan lain pun turut diperjualbelikan seperti: rotan dan binatang langka (French, *op. cit.*: 428). Perlu dicatat bahwa hasil hutan yang diambil tidak mendatangkan keuntungan bagi penduduk setempat tetapi bagi pengusaha (orang luar), sehingga penduduk lokal tetap miskin dalam lingkungannya yang kaya raya.

Yang ketiga adalah PT. Freeport Indonesia. Perusahaan raksasa milik USA ini memulai kontrak kerjanya pada tahun 1967 dan tiga tahun kemudian sumur Erztberg II ditemukan yang kemudian pun turut digarap (Petocz, 1987: 143). Sejak awal sudah tidak ada suatu pembicaraan resmi dengan orang-orang setempat sebagai pemilik hak ulayat atas tempat tersebut. PT. Freeport setelah mendapat konsesi usaha langsung mulai mengeksploitir sumber tembaga dan emas yang ada tanpa suatu pengelolaan limbah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dampaknya terlihat pada kerusakan lingkungan yang sulit sekali untuk dipulihkan kembali: kurangnya populasi ikan, penumpukan limbah di dataran rendah dan aliran air asam tambang (Erari, 1999: 153). Sebab mereka: pemerintah RI, pemilik PT. Freeport Indonesia dan masyarakat setempat, tak pernah duduk membahas permasalahan dengan tenang, maka perbedaan pemahaman yang mendalam terhadap tanah, khususnya lokasi penambangan, tak diselesaikan dengan baik. Dalam penghayatan masyarakat pribumi, lokasi penambangan merupakan kepala ibu kandung bagi Orang-orang Amungme, yang menyimpan segala macam ajaran mama, tempat tinggal para leluhur suku. Dengan menggali lokasi tersebut berarti membunuh ibu kandung Orang-orang Amungme (*ibid.*: 144). Harga sosial apa yang harus dibayar oleh PT. Freeport bagi usahanya di tempat tersebut belum bisa dipastikan pada saat ini, namun seperti yang terjadi dengan masyarakat asli di tempat-tempat lain adalah kemurungan dan kehancuran, ketiadaan gairah hidup sebagai akibat penindasan fisik dan moril yang dialami (Durning, *op. cit.*: 216).

Terhadap situasi yang ada masyarakat Amungme dan Komoro bangkit dan mengadakan perlawanan yang dimulai dengan menanam patok pada tahun 1972 di Erztberg. Kemudian diteruskan dengan perlawanan Amungme pada tahun 1977 dan kemudian Insiden Timika pada tahun 1996 (Erari, *op. cit.*: 154). Yang paling baru adalah demonstrasi di Abepura (Maret 2006), Timika, bahkan di Jakarta yang menuntut ditutupnya PT. Freeport Indonesia. Reaksi pemerintah terhadap perlawanan masyarakat setempat bersifat represif dengan lebih mengedepankan TNI dan POLRI daripada suatu dialog damai. Reaksi demikian berhasil mendiamkan rakyat untuk sementara waktu, tetapi gerakan demikian akan muncul lagi di masa yang akan datang.

Sesudah suatu perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya PT. Freeport mau membayar kompensasi 1% dari pendapatan kotor bagi orang-orang setempat. Suatu jumlah yang menurut beberapa kalangan masih terlalu kecil, bila dibandingkan dengan hasil yang diambil dari sana. Terdapat tiga hal yang lebih penting dibandingkan uang yang dibayarkan. Yang pertama menyangkut pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat atas lokasi penambangan, sehingga mereka diperlakukan sebagai manusia semartabat dengan yang lain-lain. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Keadilan bukan hanya berlaku dalam pembagian hasil di antara PT. Freeport dan masyarakat setempat tetapi perusahaan juga diwajibkan berlaku adil terhadap lahan yang digarap dan lingkungan sekitarnya,



sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan manusia yang ada di sekitarnya seperti yang dirasakan pada saat sekarang ini. Yang terakhir adalah jaminan keamanan bagi Orang-orang Amungme dan Komoro, masyarakat setempat, agar mereka dapat hidup dengan tenang dan damai di atas tanahnya sendiri. Namun yang tetap tinggal menjadi pertanyaan bagi saya, yakni: “Apa dampak dari rasa kehilangan ibu kandung bagi kehidupan Orang-orang Amungme di hari-hari yang akan datang?”

Pemenuhan Kebutuhan akan Ruang

Dalam studi awalnya tentang urbanisasi, Wirth menegaskan bahwa salah satu ciri khas kota adalah jumlah dan kepadatan serta kemajemukan penduduknya yang melebihi daerah pedesaan (1980: 20). Semakin banyak manusia, semakin banyak pula lokasi yang dibutuhkan untuk pelbagai macam kebutuhan, mis.: pemukiman, pertanian, fasilitas umum: jalan-jalan raya, kantor, pusat perbelanjaan dan bangunan ibadat. Singkatnya, di wilayah di mana terdapat banyak penduduk, hampir dapat dipastikan bahwa mereka mengalami kesulitan dengan tempat kosong, karena sebagian besar tanah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Salah satu hal yang menyolok mata di perkotaan adalah bangunan-bangunan megah letaknya berdampingan dengan gubuk reyot dan hampir tidak layak huni yang menunjukkan kontras antar pemiliknya. Selain bangunan megah terlihat pula tendensi untuk mendirikan bangunan bertingkat yang bertumbuh bagaikan jamur. Hal ini menjadi solusi terhadap masalah semakin minim dan mahalnya tanah bagi kaum urban. Di samping itu terlihat pula kebutuhan akan ruang yang lebih banyak daripada sebelumnya, terutama bagi keluarga-keluarga kelas menengah ke atas. Hal ini nampak pada bangunan rumah yang ditempati, mis.: ada ruang tamu resmi dan ruang tamu keluarga, kamar tidur terpisah bagi orangtua dan anak-anak, garasi dan tempat untuk hobi seperti bunga atau kandang binatang.

Di mana manusia hidup di sana pula terdapat kebutuhan akan lahan untuk pertanian. Orang-orang berkebun untuk memenuhi kebutuhan setiap hari atau kebutuhan pasar seperti perkebunan pisang, jeruk, kopi, kakao dan seterusnya. Yang nampak di kota-kota, seperti Jayapura misalnya, daerah sekitar kota telah menjadi gundul akibat kebun-kebun kaum urban, bahkan hutan lindung pun digarap untuk



memenuhi kebutuhan mereka dan yang jauh lebih memprihatinkan lagi mereka dengan tahu dan mau melakukannya (Nita 2006: 12). Akibat dari tindakan mereka, tekanan terhadap lingkungan semakin bertambah dan semakin berkurang lahan kosong di sekitar kota.

Selain pemanfaatan lahan untuk keperluan pribadi, juga tanah dibutuhkan untuk membangun fasilitas umum yang kiranya dapat berguna bagi semua orang. Saya ambil sebagai contoh daerah perkotaan. Fasilitas umum seperti jalan yang mulus, bangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat-tempat rekreasi dan hiburan, bangunan-bangunan ibadat dan pabrik-pabrik, merupakan daya tarik tersendiri bagi kaum urban yang bermigrasi ke kota-kota (Kloos, 1991: 125).²² Perluasan fasilitas mempersempit ketersediaan lahan kosong dan semakin menyingkirkan masyarakat setempat ke bagian-bagian kota yang tak diinginkan secara manusiawi, karena tanah mereka diambil alih oleh pemerintah atau pihak swasta. Proses yang terjadi secara alamiah ini menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena anak-cucu pemilik tanah (penduduk setempat) mulai menuntut ganti rugi atas tanah yang telah dilepaskan oleh generasi-generasi pendahulu mereka. Palang-memalang tanah, jalan dan bangunan merupakan strategi yang digunakan untuk memperkuat tuntutan mereka, agar dibayarkan ganti rugi bagi pemilik hak ulayat tanah. Namun masalahnya menjadi lebih rumit, karena kemudian hari masih ada lagi tuntutan ganti rugi oleh orang-orang yang merasa berhak atas tanah tersebut dan tuntutan demikian tak pernah berakhir.

Penutup

Manusia dan lingkungan hidup menjadi dilema abadi bagi manusia, karena di satu pihak pembangunan terarah dan berpusat pada manusia dan di pihak lain lingkungan hidup harus dijaga dan dilestarikan agar menjamin kelangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Mengakhiri tulisan ini, saya ingin menarik beberapa kesimpulan berikut.

²² Penelitian tim STFT Fajar Timur 2003 memperlihatkan bahwa kaum urban berpindah karena alasan ekonomis, juga karena ingin memperbaiki nasib hidup melalui pemanfaatan fasilitas umum yang tersedia di kota, a.l.: fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja.





Yang pertama harus diakui bahwa secara sosio-antropologis ada suatu relasi khusus di antara Orang-orang Papua dengan tanahnya. Hubungan unik tersebut bukan hanya lahir dari motif ekonomis melainkan dari motif sosio-religius. Tanah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pribadi Orang-orang Papua, sehingga jika tidak diperhatikan oleh para perencana pembangunan, maka akan mendatangkan bencana bagi orang-orang pribumi.

Yang kedua terjadi degradasi dalam relasi di antara Orang-orang Papua dengan tanahnya sebagai akibat dari kontak dengan budaya luar, terutama ekonomi pasar yang lebih mengandalkan uang sebagai alat tukar. Proses degradasi berjalan lebih cepat akibat kemajuan teknologi, sarana transportasi dan telekomunikasi modern yang masuk ke wilayah-wilayah terpencil.

Selanjutnya, harus diakui bahwa sedang berlangsung penggundulan hutan akibat pengelolaan hutan yang tidak bertanggungjawab dan penghancuran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri yang sembarangan. Situasi ini berdampak langsung pada hidup flora dan fauna, namun manusia pun tidak luput dari akibat pengrusakan lingkungan hidup tersebut.

Yang terakhir berkaitan dengan masalah-masalah tanah, lingkungan hidup yang sedang dihadapi. Solusi yang diusahakan seharusnya melibatkan semua pihak yang terkait di dalamnya dengan memperhatikan prinsip keadilan, penghargaan dan penghormatan, serta jaminan keamanan dan kedamaian bagi masyarakat pribumi.

Manusia dan tanah mempunyai keterkaitan yang unik dan sering kali sulit untuk dipahami. Dalam kehidupan setiap hari sering terdengar kata-kata: “Ini tanah kami, ini mama kami.” Mengalami hal seperti itu, saya bertanya kepada diri sendiri: “Apakah orang-orang itu menyadari dan menghidupi apa yang diucapkannya atau apakah kata-kata seperti itu hanyalah retorik yang tak perlu ditanggapi?” Pertanyaan ini menjadi semakin relevan, bila kita melihat bahwa Orang-orang Papua mudah sekali memalang kantor atau jalan yang sama berkali-kali dengan tujuan ekonomis. Pertanyaan ini pun meninggalkan suatu masalah teoretis yang belum dijawab dalam artikel ini, yaitu: “Bagaimana kepemilikan tanah dalam masyarakat Papua, khususnya di kota Jayapura dan sekitarnya, karena pemalangan selalu terjadi pada lokasi-lokasi yang sama?” Sebaiknya dicarikan jawaban atas pertanyaan tersebut, agar memberikan

rasa aman dan tenang baik bagi mereka yang punya hak ulayat maupun bagi mereka yang ingin mengadakan investasi di tanah Papua.



Daftar Rujukan

- Baal, J. van. 1966. *Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture (South New Guinea)*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Boelaars, J. 1981. *Headhunters about Themselves: An ethnographic Report from Irian Jaya, Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- _____.1984. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu penelitian antropologi budaya*. Kata Pengantar oleh M. Dawam Rahardjo. Jakarta: PT Gramedia.
- _____.1986. *Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Borsboom, A. 1994. “Gedragingen rond het sterven: Dodenriten bij Australische Aborigines”, dalam Driessen Henk & Hub de Jonge (eds.): *In de Ban van Betekenis: Proeven van Symbolische Antropologie*. Nijmegen: SUN.
- Borsboom A. & A. Ploeg. 1992. *Stille Zuidzee*. s-Gravenhage: Koninklijk Instituut voor Tropen/Novib.
- Bria, W. 2004. *Tanah sebagai Ibu bagi Masyarakat Papua*. Jayapura: STFT Fajar Timur (makalah akhir).
- Chang, W. 1989. *Jiwa Kosmis Fransiskus dari Assisi*. Ende: Penerbit Nusa Indah.
- Durning, A.Th. 1995. “Mendukung Penduduk Asli”, dalam Lester R. Brown dkk.: *Masa Depan Bumi*, hal. 204-261. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Elkins A. P. 1986. *The Australian Aborigines*. Australia: Angus & Robertson Publishers.
- Erari K. Ph. 1999. *Tanah Kita, Hidup Kita: Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- French H. F. 1995. "Mendamaikan Perdagangan dan Lingkungan Hidup". dalam Lester R. Brown dkk.: *Masa Depan Bumi*, hal. 418-476. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Penyunting: Jonny Purba, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasipmabin, D. 2005. *Ritus Inisiasi Kamil Nenga di Pegunungan Bintang: Suatu Tinjauan Antropologis*. Jayapura: STFT Fajar Timur (makalah).
- Kloos, P. 1991. *Culturele Antropologie: Een Inleiding*. Assen: Van Gorcum.
- Lieber, M. D. 1990. "Lamarckian Definition of Identity on Kapingamarangi and Pohnpei", dalam J. Linnekin and L. Poyer (eds.): *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, hal. 70-101. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Linnekin, J. and L. Poyer. 1990. "Introduction", dalam J. Linnekin and L. Poyer (eds.), *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, hal. 1-16. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Maddock, K. 1986. "The Australian Aborigines". Australia: Penguin Books Ltd.
- Nita, L. 2006. "Pola Pelayanan Pastoral Terhadap Kaum Urban Suku Dani demi Partisipasi Aktif dalam Pelestarian Hutan Lindung di Angkasa – Jayapura". Jayapura: STFT Fajar Timur (makalah).
- Petocz, R. G. 1987. "Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya", hal. 141-145. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
- Pouwer, J. 1955. *Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Zuidwest Nieuw Guinea)*. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij – en Uitgeversbedrijf.
- Resubun, I. 2004. "Identitas Orang Melanesia", dalam *Limen* 1, 1, hal. 69-86.
- Ruwiastuti, M. R. 2000. *Sesat Pikir: Politik Hukum Agraria*, Penyunting Noer Fauzi. Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Sarpenti, L. M. 1965. *Cultivators in the Swamps*. Assen: van Gorcum en Com.N.V.
- Schoorl, J. W. (1957). *Culture and Change among the Muyu*. Leiden: KITLV Press.

- Stockton, E. D. 1986. *This Land, Our Mother*. CCJP Occasional Paper, no. 9 March, Australia.
- Tenjap, T. 1974. *Beberapa Catatan Antropologis Sub-suku Kakero dan Wudaghang, Suku Anyu di Daerah Mappi*. Jayapura: STFT Fajar Timur (Skripsi).
- Tim Peneliti STFT Fajar Timur. 2003. *Dampak Kehadiran Kelompok Urban Dani, Paniai, Ngalum dan Mandobo di Kota Jayapura dan Sekitarnya*. Jayapura: BALITBANGDA PEMDA PROVINSI PAPUA dengan Biro Penelitian STFT FAJAR TIMUR (Laporan Penelitian).
- Walker, R. J. 1989. "Colonization and Development of Maori People", dalam Howard Michel (ed.): *Ethnicity and National Building in the Pacific*, hal. 152-68. Tokyo: United Nations University.
- Watson, J. B. 1990. "Other People Do Other Things: Lamarckian Identity in Kainantu Subdistrict", dalam J.Linnekin and L.Poyer, *Cultural Identity and Ethnicity in the Pacific*, hal. 17-41. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Wirth, L. 1980. "Urbanism as a Way of Life", dalam G. Gmelch & W. P. Zenner (eds.): *Urban Life: Readings in Urban Anthropology*, hal. 9-25, New York: St.Martin's Press, Inc.

Harian Cenderwasih Pos (Cepos):

- Senin, 19 Juni 2006, hal. 1 & 2.
- Kamis, 09 Juni 2006, hal. 12.
- Sabtu, 28 Mei 2006, hal. 1 & 4.
- Kamis, 16 Maret 2006, hal. 1 & 2
- Senin, 06 Maret 2006, hal. 1 & 2.
- Kamis, 02 Maret 2006, hal. 1 & 7.
- Selasa, 17 Januari 2006, hal. 10.
- Sabtu, 23 Juli 2005, hal. 12.
- Selasa, 05 Juli 2005, hal. 10.
- Jumat, 01 Juli 2005, hal. 13.
- Selasa, 07 Juni 2005, hal. 9 & 11.
- Sabtu, 24 April 2005, hal. 5.